

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara di Asia Timur telah menyebabkan ketidakstabilan global. Masalah ini menarik perhatian komunitas internasional karena mengancam keamanan negara-negara di kawasan tersebut.¹ Program nuklir dan uji coba misil Korea Utara menjadi ancaman langsung bagi negara tetangganya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, tindakan Korea Utara ini juga memicu pola aksi–reaksi berantai di antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini menciptakan dilema keamanan yang berlapis, meningkatkan kecurigaan antarnegara, dan membuat kawasan Asia Timur berada dalam keadaan yang sangat mudah mengalami eskalasi.²

Pada Januari 2024, Korea Utara diperkirakan telah memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir, dan memiliki bahan baku yang cukup untuk membuat sekitar 70–90 senjata nuklir. Selain itu, Korea Utara juga mengembangkan program senjata kimia dan biologis yang cukup maju.³ Ancaman ini diperburuk oleh perkembangan pesat program misil Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Mei 2019, Korea Utara berulang kali meluncurkan jenis baru rudal balistik jarak pendek yang mampu terbang pada ketinggian rendah dengan lintasan tidak teratur, sehingga

¹ Dwi Ardiyanti, Hesti Rokhaniyah, dan Sindi Dini Danea, “Impact Of GSOMIA (General Security Of Military Information Agreement) Treaty Bilateral Military Cooperation Between Japan And South Korea,” 2016, 536–43.

² M Najeri Al Syahrin, “Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerja Sama Keamanan Asia Timur,” *Nation State: Journal of International Studies* 1, no. 1 (2018).

³ “Arms Control and Proliferation Profile: North Korea,” Arms Control Association, 2024, <https://www.armscontrol.org/factsheets/arms-control-and-proliferation-profile-north-korea#Additional>.

sulit dideteksi dan dicegat. Sejak September 2021, Korea Utara juga berturut-turut menguji rudal “hipersonik” serta jenis baru rudal balistik jarak pendek yang memiliki pola lintasan yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Eskalasi ini meningkat tajam pada 2022 ketika Korea Utara menembakkan berbagai rudal balistik antarbenua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM), dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁴

Tren peningkatan ini berlanjut pada 2023, ketika Korea Utara kembali menembakkan ICBM dan rudal balistik jarak menengah atau *Intermediate Range Ballistic Missile* (IRBM) berbahan bakar padat, serta melakukan peluncuran satelit menggunakan teknologi rudal balistik. Pada saat yang sama, Korea Utara terus memperkuat kemampuan nuklir dan misilnya dengan memperluas jenis peluncur, memperbarui teknologi, dan meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, serta pengintaian. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini mengancam negara-negara tetangganya, terutama Jepang dan Korea Selatan. Korea Utara diperkirakan telah berhasil melakukan miniaturisasi hulu ledak nuklir sehingga dapat dipasang pada rudal balistik dengan jangkauan yang mencakup wilayah Jepang.⁵ Kedua negara ini, yang secara geografis sangat dekat dengan Korea Utara, menganggap keamanan negara dan warganya terancam.⁶

Sejak tahun 2006 ketika Korea Utara pertama kali melakukan uji coba nuklir, ketegangan regional meningkat drastis dan memicu kekhawatiran dari komunitas

⁴ Japan Ministry of Defense, “Recent Missile & Nuclear Development of North Korea,” 2025.

⁵ Japan Ministry of Defense.

⁶ Ardiyanti, Rokhaniyah, dan Dana, “Impact Of GSOMIA (General Security Of Military Information Agreement) Treaty Bilateral Military Cooperation Between Japan And South Korea.”

internasional.⁷ Korea Utara dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Jepang, bahkan lebih besar dibandingkan ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Sejumlah uji coba rudal Korea Utara yang melintas di atas wilayah Jepang semakin menjadi ancaman bagi Jepang karena adanya kemungkinan kesalahan teknis atau kekeliruan kecil yang bisa saja memicu insiden yang merugikan Jepang.⁸ Rezim Kim Jong-un menunjukkan perilaku yang sulit diprediksi dan kerap mengambil keputusan ekstrem yang menimbulkan ketidakpastian strategis.⁹ Tindakan ini membuat Jepang menilai bahwa Korea Utara bukan hanya ancaman militer, tetapi juga sumber ketidakstabilan regional yang dapat memengaruhi keamanan nasional dan psikologis masyarakat Jepang secara langsung. Karena itu, Jepang memandang Korea Utara bukan hanya sebagai ancaman militer, tetapi juga sebagai faktor ketidakstabilan yang dapat memicu krisis besar di kawasan kapan saja.

Eskalasi ancaman Korea Utara tidak hanya tercermin dari peningkatan kuantitas uji coba misil, tetapi juga dari perkembangan kualitas teknologi persenjataannya. Salah satu contoh konkret terlihat dari peluncuran rudal balistik Korea Utara ke arah Laut Jepang pada awal 2025, yang diduga merupakan uji coba rudal hipersonik berbahan bakar padat dengan kemampuan manuver tinggi, lintasan rendah, dan kecepatan di atas lima kali kecepatan suara. Rudal tersebut menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer dan jatuh di perairan timur Semenanjung Korea, tepat di luar Zona Ekonomi Eksklusif Jepang, sehingga memicu kekhawatiran serius di Tokyo dan Seoul.

⁷ Raihan Ronodipuro, "North Korea's Nuclear Threat and East Asia's Regional Security Stability," *Modern Diplomacy*, 2021, <https://modern diplomacy.eu/2021/04/18/north-koreas-nuclear-threat-and-east-asias-regional-security-stability/>.

⁸ Kazuto Suzuki, "Japan's View of the North Korean Threat by Kazuto Suzuki," *IAI COMMENTARIES*, 2018, 1–4.

⁹ Suzuki.

Perdana Menteri Jepang menyoroti tingginya frekuensi peluncuran rudal Korea Utara dan kemungkinan peningkatan kapabilitas teknologi setiap kali uji coba dilakukan, sementara Kementerian Pertahanan Jepang menekankan pentingnya kerja sama erat dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam analisis intelijen dan pengawasan keamanan.¹⁰ Dinamika ini menunjukkan bahwa ancaman Korea Utara bersifat berkelanjutan dan semakin sulit diprediksi, sehingga mendorong Jepang untuk memperkuat mekanisme pertahanan berbasis kerja sama intelijen dan koordinasi keamanan regional.

Sikap Korea Utara yang sering kali mengejutkan stabilitas dan keamanan Asia Timur Laut melalui berbagai uji nuklir, peluncuran rudal, penguatan militer, dan parade militer, menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Jepang, sebagai negara tetangga Korea Utara yang dipisahkan oleh Laut Jepang, memandang perilaku Korea Utara sebagai ancaman yang sangat serius terhadap keberadaannya.¹¹ Ancaman nuklir Korea Utara telah menjadi perhatian utama Jepang karena potensi dampaknya terhadap keamanan nasional dan stabilitas regional di Asia Timur Laut.

Di sisi lain, Jepang berada dalam kerangka konstitusional yang dibatasi oleh Pasal 9, yang menekankan orientasi pertahanan dan menolak penggunaan kekuatan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional, serta kemampuan militer ofensif maupun tindakan konfrontatif secara langsung.¹² Kondisi ini menciptakan dilema bagi Jepang, dimana ancaman nuklir dan misil Korea Utara

¹⁰ Kyodo News, "North Korea fires suspected hypersonic missile: South Korean sources," Kyodo News, 2025, <https://english.kyodonews.net/articles/-/52316>.

¹¹ Theofilus Jose Setiawan dan Jefferson Winata Bachtiar, "Interpreting Japan's Security Interests In The Korean Peninsula," *Malaysian Journal of International Relations* 11 (2023): 88–106.

¹² "Japan Constitution, Chapter II : Renunciation of War, Article number 9," n.d.

yang bersifat nyata, terjadi secara berulang dan semakin canggih, di sisi lain, Jepang tidak dapat secara bebas mengadopsi pola militer ofensif atau melakukan mobilisasi kekuatan seperti negara yang tidak memiliki batasan konstitusional serupa.

Peluncuran rudal yang melewati wilayah udara Jepang, serta uji coba nuklir Korea Utara, mendorong Jepang untuk memperkuat strategi pertahanan dan memperhatikan perkembangan militer di Semenanjung Korea. Dalam kondisi ancaman yang nyata dan berulang tersebut, Jepang berada pada posisi yang menuntut respons strategis yang tegas. Namun, sebagai negara yang secara konstitusional dibatasi oleh Pasal 9, ruang gerak Jepang dalam mengadopsi kebijakan militer ofensif tidak sepenuhnya fleksibel. Dari penjelasan ini, penulis merasa bahwa isu ini sangat menarik untuk diteliti dengan melihat bagaimana strategi yang dilakukan Jepang untuk merespon ancaman yang nyata dan agresif dari Korea Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Asia Timur merupakan kawasan yang memiliki dinamika keamanan tinggi, terutama karena ketegangan di Semenanjung Korea. Kawasan ini menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Jepang, yang berusaha melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman regional. Salah satu ancaman utama bagi Jepang adalah program nuklir dan peluncuran rudal Korea Utara, yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan tetapi juga mengancam eksistensi Jepang secara langsung. Ancaman ini mendorong Jepang untuk memperkuat strategi keamanan nasionalnya, namun Jepang dibatasi oleh Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang melarang pembangunan kemampuan militer ofensif maupun tindakan konfrontatif. Oleh

karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan peneliti jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis strategi apa yang dilakukan Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan memperkaya wawasan akademik di bidang Hubungan Internasional, terutama yang berkaitan dengan studi mengenai studi strategi keamanan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan strategi Jepang dalam menanggapi ancaman Korea Utara.

1.6 Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan urgensi untuk meneliti isu yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai strategi Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara, peneliti berupaya menghimpun berbagai data relevan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dan empiris. Data tersebut dikumpulkan melalui serangkaian karya tulis ilmiah terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan pijakan yang kuat bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Studi pustaka yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Linas Didvalis dan Jiabin Song dengan judul, “*Between Nuclear Autonomy and Foreign Extended Nuclear Deterrence Protection: The Case of Japan*”.¹³ Penelitian ini melakukan analisis terhadap *nuclear security deterrence strategy dilemma* Jepang dengan menggunakan *nuclear deterrence theory* sebagai kerangka konseptual utama. Penelitian ini menjelaskan bahwa kapasitas nuklir Jepang terbatas sehingga tetap berlandung pada payung nuklir Amerika Serikat. Penelitian ini juga memberikan penjelasan akan kepentingan nasional keamanan serta kredibilitas Jepang sehingga memperlihatkan arah kebijakan keamanan Jepang.

Penelitian ini menjadi salah satu acuan peneliti karena memberikan gambaran tentang bagaimana *point of view* Jepang terhadap kekuatan nuklir sebagai instrumen keamanan, serta memberikan pemahaman faktor-faktor domestik Jepang yang mempengaruhi arah kebijakan keamanan Jepang. Penelitian karya Song ini memiliki perbedaan kerangka konsep dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Studi pustaka selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Sigit, Theofilus Jose Setiawan, dan Jefferson Winata Bachtiar dengan judul “*Interpreting Japan’s Security Interests in the Korean Peninsula*”.¹⁴ Penelitian ini membahas kepentingan keamanan Jepang di Semenanjung Korea dengan menggunakan teori realisme sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini menemukan empat motivasi fundamental kebijakan keamanan Jepang terhadap Korea Utara, yaitu rekonsiliasi pascaperang, keamanan, kepentingan ekonomi, serta kedaulatan nasional dan

¹³ Linas Didvalis dan Jiabin Song, “Between Nuclear Autonomy and Foreign Extended Nuclear Deterrence Protection : the Case of Japan” 21 (2023): 5–36.

¹⁴ Setiawan And Bachtiar, “Interpreting Japan ’ S Security Interests In The Korean Peninsula.”

keselamatan warga Jepang. Penelitian ini juga menjelaskan ancaman yang dihadapi Jepang, termasuk pengembangan program nuklir, peluncuran rudal balistik, penculikan warga, dan serangan siber, yang diperparah oleh latar belakang historis ketegangan guna mendorong perlunya kerja sama keamanan dan diplomasi multilateral.

Studi ini menjadi salah satu acuan penulis karena memberikan penjelasan tentang bagaimana kepentingan keamanan Jepang di Semenanjung Korea. Studi ini juga menjelaskan keterbatasan konstitusional Jepang pada Pasal 9 Konstitusi Jepang tentang penolakan terhadap perang yang membuat negara ini tidak dapat memperkuat militernya secara ofensif dan bergantung pada aliansi untuk mempertahankan kapasitas pertahanan mereka. Studi ini juga meyakini bahwa kepentingan keamanan Jepang masih menjadi dilema yang kompleks di kawasan Asia Timur Laut. Jepang, yang diancam oleh berbagai program militer Korea Utara, khususnya pengembangan senjata nuklir dan rudal, harus merumuskan kebijakan keamanan yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Studi pustaka selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Stephan Haggard dan Tai Ming Cheung berjudul “*North Korea’s nuclear and missile programs: Foreign absorption and domestic innovation*”.¹⁵ Penelitian ini menganalisis program senjata nuklir dan rudal Korea Utara yang menggabungkan penyerapan teknologi asing dengan inovasi domestik yang didorong melalui model mobilisasi otoriter yang sangat terpusat. Haggard dan Cheung menjelaskan bahwa keberhasilan Korea Utara dalam mengembangkan kapabilitas nuklir dan rudal

¹⁵ Stephan Haggard dan Tai Ming Cheung, “North Korea’s nuclear and missile programs : Foreign absorption and domestic innovation,” *Journal of Strategic Studies* 44, no. 6 (2021): 802–29, <https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1993828>.

balistik, meskipun dengan keterbatasan ekonomi dan isolasi internasional, terletak pada pemanfaatan sumber daya nasional yang terfokus pada pengembangan infrastruktur industri pertahanan. Penelitian ini juga menjelaskan kepemimpinan rezim Kim, yang memprioritaskan program senjata strategis dan mengerahkan sumber daya secara maksimal meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan tekanan global.

Studi ini menjadi acuan peneliti karena studi ini memberikan pandangan mengenai kepentingan Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklirnya. Menurut Haggard dan Cheung, pengembangan program ini memiliki dampak strategis yang mendalam terhadap stabilitas kawasan dan merupakan tantangan utama bagi kebijakan keamanan negara-negara tetangga, khususnya Jepang.

Kajian pustaka selanjutnya adalah penelitian karya Md. Ashraful Amin dan rekan berjudul *“Escalating Risks: How North Korea’s Weapons Program Challenges Japan’s Security Framework”*.¹⁶ Penelitian ini mengkaji bagaimana kemajuan program senjata Korea Utara, seperti nuklir, rudal balistik jarak jauh, dan dimensi baru seperti pendalaman kerja sama dengan Rusia yang mengguncang kerangka keamanan Jepang dan mengubah kalkulus keamanan kawasan Asia Timur. Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan sumber sekunder, dengan memaparkan evolusi program senjata Korea Utara, perluasan ancaman (nuklir, rudal, siber, dan kemungkinan kimia/biologi), serta implikasinya terhadap kebijakan keamanan Jepang yang dibatasi oleh Pasal 9 Konstitusi namun bertumpu pada aliansi dengan Amerika

¹⁶ Ashraful Amin, Fahim Azizur Rahman, dan Masbahul Islam, “Escalating Risks : How North Korea ’ s Weapons Program Challenges Japan ’ s Security Framework,” *Historical: Journal of History and Social Sciences* 4, no. 1 (2025): 80–92.

Serikat. Temuan studi ini menunjukkan bahwa intensifikasi uji coba rudal dan peningkatan kapabilitas nuklir Korea Utara mendorong Jepang melakukan adaptasi mendalam berupa peningkatan signifikan anggaran pertahanan, modernisasi *Self-Defense Forces*, penguatan sistem pertahanan rudal (Aegis, PAC-3, rencana kemampuan serangan balasan), reinterpretasi Pasal 9 untuk memungkinkan *collective self-defence* yang terbatas, serta pendalaman kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dan mitra regional seperti dalam kerangka QUAD (Quadrilateral Security Dialogue).

Penelitian ini menjadi salah satu acuan peneliti karena memberikan gambaran mengenai bagaimana ancaman konkret dari program persenjataan Korea Utara mendorong penyesuaian kebijakan keamanan Jepang, khususnya melalui peningkatan kapabilitas pertahanan dan penguatan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat serta mitra regional. Penelitian karya Amin dkk. ini memiliki perbedaan kerangka konsep dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena menggunakan pendekatan kebijakan keamanan tanpa membahas konsep *balancing*, sementara penelitian penulis secara tegas menggunakan konsep *limited hard balancing* sebagai strategi yang digunakan oleh Jepang.

Studi pustaka selanjutnya adalah penelitian karya Tanveer Ahmad Khan berjudul "*Limited Hard Balancing: Explaining India's Counter Response to Chinese Encirclement*".¹⁷ Penelitian ini menggunakan kerangka *limited hard balancing* untuk menjelaskan respon India terhadap strategi pengepungan Tiongkok melalui BRI (Belt and Road Initiative) dan CPEC (Tiongkok-Pakistan

¹⁷ Tanveer Ahmad Khan, "Limited Hard Balancing Explaining India's Counter Response to Chinese Encirclement," *Journal of Indo-Pacific Affairs*, no. 523 (2023): 92–108.

Economic Corridor). Khan menguraikan bahwa negara yang menghadapi asimetri kekuatan menggunakan kombinasi pembangunan militer moderat dan kemitraan strategis (bukan aliansi formal) untuk menahan ambisi negara yang lebih kuat, termasuk melalui kerja sama pertahanan, penguatan konektivitas strategis, dan kolaborasi dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana negara menengah dapat memanfaatkan kerja sama keamanan, aliansi longgar, dan infrastruktur strategis sebagai instrumen *balancing* terhadap ancaman struktural di kawasan Indo-Pasifik.

Studi ini menjadi acuan bagi peneliti karena menawarkan kerangka teoritis *limited hard balancing* yang dapat diadaptasi untuk menganalisis strategi Jepang merespon ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Dengan kombinasi pembangunan kapabilitas pertahanan dan pembentukan kemitraan strategis dengan aktor seperti Amerika Serikat dan negara-negara regional, kerangka Khan membantu menjelaskan bagaimana Jepang menggunakan strategi *limited hard balancing*. Dengan demikian, penelitian ini membantu penulis dalam menggunakan konsep *limited hard-balancing*.

Studi pustaka berikutnya adalah penelitian Thaingi Khin Htwe berjudul “*Japan’s Balancing Act: Assessing Japan’s Foreign Policy towards Myanmar in the Emerging Indo-Pacific Era*”¹⁸. Penelitian ini mengkaji penyesuaian kebijakan luar negeri Jepang terhadap Myanmar dalam visi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang diperkenalkan oleh Shinzo Abe untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. Htwe berargumen bahwa kebijakan Jepang terhadap Myanmar dapat

¹⁸ Thaingi Khin Htwe, “Japan’s Balancing Act: Assessing Japan’s Foreign Policy towards Myanmar in the Emerging Indo-Pacific Era Thaingi” 02, no. 02 (2021): 1–14.

dipahami sebagai strategi *limited hard balancing* terhadap Tiongkok, yang diwujudkan melalui tiga instrumen utama (3Ds), yaitu *diplomatic engagement*, *defense cooperation*, dan *development assistance*.

Studi ini menjadi rujukan karena menunjukkan bagaimana Jepang memanfaatkan kerja sama pertahanan terbatas, dan diplomasi aktif sebagai instrumen *balancing* tanpa konfrontasi langsung, termasuk melalui inisiatif kerja sama keamanan kawasan. Studi ini menjadi rujukan juga karena dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan konsep *limited hard-balancing* dalam menganalisis penelitian yang penulis lakukan.

Studi pustaka selanjutnya adalah penelitian Renato Cruz De Castro berjudul “*Caught Between Appeasement and Limited Hard Balancing: The Philippines’ Changing Relations with the Eagle and the Dragon*”.¹⁹ De Castro menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan, dengan menyoroti pergeseran dari kebijakan *appeasement* menuju *limited hard balancing* sebagai respon terhadap ekspansi maritim dan janji investasi Tiongkok yang tidak terpenuhi. *Limited hard balancing* dalam penelitian ini terlihat pada pembangunan kapabilitas pertahanan teritorial, pelestarian aliansi dengan Amerika Serikat, dan penguatan kemitraan keamanan dengan middle powers seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan.

Penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti karena memperlihatkan bagaimana negara menengah di Asia Timur dan Asia Tenggara menggunakan kerja sama keamanan, modernisasi militer, dan aliansi longgar untuk membatasi perilaku

¹⁹ Renato Cruz De Castro, “Caught Between Appeasement and Limited Hard Balancing : The Philippines’ Changing Relations With the Eagle and the Dragon,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 4(2) (2022): 258–78, <https://doi.org/10.1177/18681034221081143>.

revisionis kekuatan besar tanpa memutus hubungan ekonomi. Pola yang ditemukan De Castro, yaitu penggunaan aliansi dengan AS, kemitraan dengan Jepang dan Korea Selatan, serta instrumen seperti perjanjian intelijen, memberi landasan untuk memahami posisi Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara strategi *limited hard balancing* yang lebih luas di kawasan. Dengan demikian, penelitian ini membantu peneliti membantu peneliti dalam menggunakan konsep *limited hard-balancing*.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam sebuah penelitian, penggunaan teori atau konsep merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam menganalisis permasalahan diatas, peneliti menggunakan konsep *Limited Hard-Balancing*

1.7.1 Balancing

Menurut Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*, teori *Balance of Power* memahami konsep balancing sebagai tindakan negara dalam mempertahankan posisinya dalam sistem, bukan meningkatkan kekuatan.²⁰ Selama berabad-abad, konsep ini dipandang sebagai landasan dasar politik internasional karena menjelaskan bagaimana negara berupaya mencegah dominasi satu kekuatan atas pihak lain. Secara umum, *balance of power* merujuk pada situasi ketika distribusi kekuatan di antara negara-negara

²⁰ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, Addison-Wesley Publishing Company (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), <https://doi.org/10.1590/s0034-73292004000100012>.

berada dalam kondisi relatif seimbang, sehingga tidak ada satu negara pun yang mampu memaksakan kehendaknya secara sepihak terhadap negara lain.

Dengan kata lain, keseimbangan kekuatan berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem internasional melalui mekanisme saling menahan. Secara tradisional, balancing dilakukan melalui dua instrumen utama. Pertama, internal balancing, yaitu peningkatan kapabilitas nasional melalui pembangunan militer, modernisasi persenjataan, dan penguatan ekonomi nasional. Kedua, external balancing, yaitu pembentukan aliansi dengan negara lain guna menghadapi ancaman bersama.²¹

Namun, perkembangan politik internasional modern menunjukkan bahwa balance of power bukan konsep yang statis. T. V. Paul menjelaskan bahwa negara dapat menggunakan berbagai bentuk balancing sesuai konteks ancaman, distribusi kekuatan, dan keterbatasan domestik yang dimiliki. Selain *hard balancing* tradisional, negara juga dapat menggunakan *soft balancing* melalui diplomasi, institusi internasional, dan tekanan ekonomi, maupun *limited hard balancing* yang berada di antara keduanya.²²

1.7.2 Limited Hard-Balancing

Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan konsep *Limited Hard-Balancing* yang diperkenalkan oleh T. V. Paul dalam bukunya yang berjudul *Restraining Great Powers*.²³ Paul memperkenalkan *limited hard balancing* sebagai kategori yang berada di antara *hard balancing* dan *soft balancing*. Dalam tradisi realis, terutama Neorealisme, *hard balancing*

²¹ Waltz.

²² T. V. Paul, *Restraining Great Powers* (New Haven and London: Yale University Press, 2018).

²³ Paul.

dipahami sebagai upaya negara untuk menghadapi ancaman besar melalui pembentukan aliansi formal, peningkatan militer besar-besaran, dan penyusunan operasi gabungan seperti NATO. Di sisi lain, konsep *soft balancing* yang diperkenalkan Paul menjelaskan bahwa negara seringkali menggunakan mekanisme non-militer seperti diplomasi, institusi internasional, dan delegitimasi untuk menahan negara kuat. Meski demikian, *soft balancing* dianggap terlalu "lembut" untuk menjelaskan situasi ketika negara tetap meningkatkan kemampuan militernya meskipun tidak sampai tingkat penuh. Untuk mengisi celah ini, Paul memperkenalkan *limited hard balancing*, yang menjelaskan situasi ketika negara menghadapi ancaman yang nyata dari negara yang *powerful* atau *threatening*, tetapi tidak cukup besar untuk memicu *hard balancing* penuh, sehingga negara memilih strategi yang melibatkan peningkatan kapasitas militer terbatas dan kerja sama keamanan yang bersifat semiformal.²⁴

Dalam kerangka Paul, '*threatening state*' tidak harus merupakan *great power* atau negara yang secara aktif menginvasi wilayah lawan. Paul mendefinisikan ancaman secara fungsional, yaitu perilaku yang meningkatkan biaya keamanan negara lain dan menciptakan tekanan koersif. Korea Utara memenuhi kriteria ini melalui: (1) uji coba rudal balistik berulang yang melintas di atas wilayah Jepang, mengancam kedaulatan dan keamanan fisik warga Jepang; (2) pengembangan hulu ledak nuklir yang diminiaturisasi dan berpotensi menjangkau seluruh kepulauan Jepang; dan (3) perilaku yang

²⁴ Paul.

secara konsisten mengganggu stabilitas regional dan memaksa Jepang meningkatkan pengeluaran pertahanan.

Limited Hard Balancing merupakan strategi keamanan menengah yang dirancang bagi negara-negara yang menghadapi ancaman dari kekuatan yang lebih besar namun tidak dapat atau tidak bersedia merespon dengan mobilisasi militer penuh. Paul secara eksplisit menegaskan bahwa strategi ini mengasumsikan adanya rivalitas yang terbatas atau parsial (*limited or partial rivalry*), dan dapat pula muncul pada fase pra-rivalitas ketika suatu negara mengantisipasi kemungkinan ancaman di masa depan sebagai bentuk *hedging*.²⁵ Berbeda dengan *hard balancing* tradisional yang memerlukan mobilisasi militer penuh dan aliansi militer formal yang kuat, serta berbeda pula dengan *soft balancing* yang hanya mengandalkan diplomasi dan institusi internasional, *limited hard balancing* menggabungkan peningkatan kapabilitas militer yang terukur dengan pembentukan aliansi informal dan penggunaan diplomasi secara strategis. Tujuan dari strategi ini, sebagaimana Paul tegaskan, bukan untuk mencapai paritas kekuatan yang sama dengan lawan, melainkan untuk membuat serangan potensial menjadi mahal dan menggagalkan upaya koersi. Paul menjelaskan bahwa strategi *Limited Hard Balancing* terdiri dari dua mekanisme utama, yaitu:

1. *Limited Arms Build-up*

Limited hard balancing mengandalkan pembangunan kekuatan militer terbatas (*limited arms buildup*) sebagai elemen inti pertama. Paul mendefinisikannya sebagai peningkatan kapabilitas militer yang tidak

²⁵ Paul.

bertujuan untuk mencapai kesetaraan penuh dengan negara kuat yang mengancam, melainkan bersifat asimetris untuk membuat agresi atau ancaman yang dilakukan lawan menjadi mahal dan sulit dilakukan.

Paul menegaskan bahwa *limited arms buildup* mengandalkan "*asymmetrical arms buildups*" sebagai karakteristik utamanya. Strategi ini menghindari perlombaan senjata besar-besaran, karena negara yang menggunakannya menyadari keterbatasan sumber dayanya dan tidak berupaya menyamai kekuatan lawan di semua bidang militer. Tujuan utama *limited arms buildup* adalah menahan perilaku mengancam kekuatan besar dengan meningkatkan biaya dan risiko bagi lawan yang ingin memaksakan kehendaknya, serta menciptakan efek pencegahan (*deterrence*) tanpa pengeluaran sumber daya yang berlebihan.²⁶ Dalam praktiknya, *limited arms buildup* dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk tindakan berikut:

1. Peningkatan anggaran pertahanan secara terukur
2. Investasi militer yang bersifat defensif dan asimetris, yaitu peningkatan kapabilitas yang secara langsung merespon ancaman spesifik tanpa mengembangkan postur perang ofensif penuh. Ini dapat mencakup, misalnya, pembangunan sistem pertahanan rudal untuk menghadapi ancaman balistik, akuisisi alutsista yang meningkatkan mobilitas dan kesadaran situasional, hingga eksplorasi opsi serangan balik (*counterattack options*) yang terbatas
3. Modernisasi sistem *command-and-control*, radar, dan integrasi intelijen yang meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons

²⁶ Paul.

terhadap ancaman spesifik, tanpa peningkatan pasukan atau senjata ofensif secara menyeluruh.

Limited arms buildup tidak melibatkan upaya untuk mencapai kesetaraan kekuatan secara keseluruhan, melainkan hanya membangun kemampuan yang membuat serangan lawan menjadi sulit untuk dilakukan dan tidak menarik secara strategis. Paul menekankan bahwa strategi ini *cost-effective* karena menghindari beban ekonomi perlombaan senjata penuh, sekaligus tetap memberikan respons nyata terhadap ancaman.²⁷

2. Pembentukan *Semi-Formal Alliances* seperti *Strategic Partnerships*

Mekanisme kedua adalah pembentukan aliansi semi-formal yang memungkinkan adanya aktivitas militer bersama yang terbatas dan berbagi kapasitas pertahanan, namun tidak sampai pada tahap operasi militer ofensif atau operasi militer terpadu seperti dalam aliansi formal. Paul menegaskan bahwa ambang batas antara *soft balancing* dan *limited hard balancing* dalam hal aliansi terletak di sini, yaitu kerja sama yang sekadar melibatkan latihan militer bersama terbatas masih dapat dikategorikan sebagai *soft balancing*, namun begitu hubungan berkembang menjadi sesuatu yang lebih signifikan, seperti penggunaan fasilitas pangkalan militer, maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori *limited hard balancing*.²⁸

Dalam pembentukan *strategic partnerships* tersebut, dapat dilakukan beberapa tindakan konkret berikut,

²⁷ Paul.

²⁸ Paul.

1. Pemberian dan penggunaan fasilitas pangkalan militer bagi mitra strategis
2. Pertukaran informasi dan intelijen keamanan, terutama terkait ancaman militer yang dihadapi bersama, yang bertujuan meningkatkan kesadaran situasional dan memperkuat daya tangkal
3. Koordinasi keamanan terbatas dan non-ofensif, seperti mekanisme komunikasi krisis dan penyesuaian respons awal terhadap ancaman, tanpa pembentukan struktur komando permanen

Strategic partnerships bertujuan memperkuat daya tangkal bersama dengan meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang relatif lebih lemah melalui kerja sama dengan negara yang menghadapi kekhawatiran keamanan yang serupa. Mekanisme kerja sama ini bersifat situasional dan fleksibel, sehingga dapat ditingkatkan pada saat krisis dan dilonggarkan ketika ketegangan mereda, tanpa rencana perang jangka panjang atau struktur komando tetap.²⁹ *Strategic partnerships* ini berhenti pada level kerja sama yang tidak ofensif, dan tidak ada kewajiban untuk saling mempertahankan seperti yang terdapat dalam NATO atau aliansi pertahanan formal lainnya.

Konsep *limited hard balancing* yang dikemukakan oleh Paul relevan untuk menjelaskan strategi Jepang dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara kondisi Jepang-Korea Utara dengan prasyarat teori *limited hard balancing*. Korea Utara memenuhi syarat sebagai *threatening state* dalam kerangka Paul, yaitu negara yang memiliki senjata nuklir dan rudal balistik yang secara terbuka mengancam Jepang. Selanjutnya,

²⁹ Paul.

rivalitas antara Jepang dan Korea Utara bersifat parsial, bukan total, dimana ada ancaman konkret dan nyata, namun kedua negara tidak berada dalam kondisi perang terbuka, masih terdapat ruang diplomatik, dan Jepang memiliki kepentingan untuk tidak mendorong eskalasi yang lebih besar di kawasan.

Teori ini juga relevan karena keterbatasan konstitusional Jepang (Pasal 9) menempatkan Jepang pada posisi yang sesuai dengan *limited hard balancing*, dimana Jepang tidak dapat dan tidak akan membangun kekuatan militer ofensif penuh untuk mencapai paritas dengan Korea Utara, namun pada saat yang sama tidak bisa hanya mengandalkan *soft balancing* menghadapi ancaman nuklir yang nyata. Paul sendiri menekankan bahwa *limited hard balancing* adalah strategi yang cocok ketika "negara yang melakukan *balancing* menganggap bahwa negara yang mengancam hanya memiliki tujuan terbatas dan dapat dibujuk untuk mengubah kebijakannya melalui mekanisme institusional atau mekanisme koersif yang terbatas."³⁰ Dengan demikian, keterbatasan konstitusional Jepang secara logis mendorong Jepang ke arah *limited hard balancing* sebagai satu-satunya respons militer yang tersedia dan proporsional.

1.8 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian nantinya akan membahas pendekatan dan jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

³⁰ Paul.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari bahan tertulis berupa tulisan yang diperoleh dari pernyataan resmi, dokumen dan penelitian sebelumnya ataupun data sekunder lainnya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi serta memberikan deskripsi yang lebih mendalam, komprehensif, dan detail mengenai suatu fenomena melalui data non-numerik, bukan mengukur atau menguji hipotesis menggunakan data numerik seperti dalam penelitian kuantitatif.³¹ Penelitian ini juga bersifat deskriptif di mana penulis akan mendeskripsikan fakta yang didapatkan secara lebih rinci dan kemudian diberikan penjelasan terkait hal tersebut sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena akan menjelaskan bagaimana strategi Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara.

1.8.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membuat batas penelitian yaitu pada tahun 2015-2025. Peneliti mengambil batas pada tahun 2015-2025 karena penulis ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara sejak pengesahan undang-undang keamanan Jepang “*Japan's New Security Bills 2015*” pada tahun 2015. Undang-undang ini mengubah kebijakan pertahanan Jepang dengan mengizinkan pertahanan diri kolektif serta memperluas peran Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) di luar

³¹ Josephine Oranga dan Audrey Matere, “Qualitative Research : Essence , Types and Advantages” 10 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.4236/oalib.1111001>.

negeri. Adanya batasan dalam penelitian ini, akan membantu peneliti agar lebih fokus terhadap isu yang diteliti.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek utama dalam penelitian yang perilaku, kebijakan, atau tindakannya dideskripsikan dan dijelaskan oleh peneliti. Dalam konteks metodologi penelitian, unit analisis sering dipahami sebagai variabel dependen karena menjadi fokus utama yang ingin dijelaskan.³² Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Jepang. Jepang menjadi unit analisis dalam penelitian ini karena berfokus pada strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam merespon ancaman yang berasal dari Korea Utara.

Unit eksplanasi adalah faktor-faktor yang memengaruhi atau menjelaskan perilaku unit analisis, sehingga sering disebut sebagai variabel independen. Unit ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa suatu aktor mengambil kebijakan atau strategi tertentu.³³ Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya adalah ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Ancaman tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan uji coba senjata nuklir serta rudal balistik, mendorong Jepang untuk memperkuat strategi keamanan dan pertahanannya.

Tingkat analisis merujuk pada sudut pandang atau level yang digunakan untuk memahami fenomena dalam hubungan internasional. Secara umum, tingkat analisis mencakup beberapa level, seperti level individu,

³² Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: Pustaka LP3S, 1994).

³³ Mas' oed.

negara, dan sistem internasional.³⁴ Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level negara, karena fokus utama penelitian adalah strategi Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara. Meskipun demikian, analisis ini tetap mempertimbangkan konteks sistem internasional, khususnya struktur keamanan regional Asia Timur dan distribusi ancaman di kawasan tersebut, sebagai faktor yang membentuk pilihan strategi Jepang.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan metode library research, peneliti memperoleh data sekunder yang berasal dari, dokumen resmi, yaitu dokumen Pasal 9 Konstitusi Jepang, laporan, seperti laporan Perkembangan Terbaru Rudal dan Nuklir Korea Utara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang, artikel jurnal, seperti penelitian oleh Stephan Haggard dan Tai Ming Cheung berjudul “*North Korea’s nuclear and missile programs: Foreign absorption and domestic innovation*” dan penelitian karya Md. Ashraful Amin dan rekan berjudul “*Escalating Risks: How North Korea’s Weapons Program Challenges Japan’s Security Framework*”, buku, seperti buku yang ditulis oleh T. V. Paul yang berjudul “*Restraining Great Powers*”, serta buku yang ditulis oleh Mochtar Mas’oed yang berjudul “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi.*”, serta sumber daring dari situs web yang terpercaya, seperti *moderndiplomacy.eu*.

³⁴ Mas’oed.

Proses penelusuran literatur bacaan yang diperoleh penulis, melalui pencarian menggunakan kata kunci “*Limited Hard Balancing*”, “*Security Strategies*”, “*North Korea nuclear threat*”, “*Japan defense strategy*”. Penggunaan kata kunci ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Dengan demikian, data yang dikumpulkan diharapkan mampu memberikan landasan empiris dan teoretis yang kuat dalam menganalisis strategi Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.³⁵

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, serta mencari tema dan pola sehingga data menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis. Dalam proses ini, peneliti harus berpijak pada tujuan penelitian, terutama karena penelitian kualitatif berfokus pada temuan. proses reduksi data membantu menyaring informasi yang paling relevan, misalnya pernyataan resmi pemerintah Jepang, dinamika ancaman rudal Korea Utara,

³⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis (3rd ed.)* (SAGE, 2014).

serta dokumen kerja sama pertahanan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola strategi Jepang secara lebih jelas dan mendalam.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, grafik, matriks, atau flowchart untuk membantu peneliti memahami temuan di lapangan dan merencanakan langkah analisis berikutnya.

3. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai bentuk pemaknaan terhadap setiap bahan yang telah dikumpulkan, dan kemudian data-data yang tersedia tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru, baik berupa deskripsi yang memperjelas fenomena, hubungan sebab-akibat, interaksi antar-aktor, hipotesis, maupun teori yang sebelumnya belum terlihat.

Data-data yang ditemukan oleh penulis akan dianalisis menggunakan konsep *limited hard-balancing*. Kemudian data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang berisikan jawaban dari pernyataan penelitian. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan memastikan data yang didapatkan dan diolah dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan,

kerangka konseptual, jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data.

BAB II: DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR

Bab ini membahas dinamika keamanan Asia Timur sebagai konteks struktural yang memengaruhi perilaku negara-negara di kawasan, termasuk Jepang. Pembahasan difokuskan pada perubahan distribusi kekuatan pasca Perang Dingin, kebangkitan Tiongkok, peran Amerika Serikat sebagai kekuatan eksternal, serta ketegangan di Semenanjung Korea akibat program nuklir dan rudal Korea Utara. Interaksi faktor-faktor tersebut membentuk lingkungan yang semakin kompetitif, ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, perlombaan senjata, dan penguatan aliansi keamanan. Dalam hal ini, bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana dinamika keamanan regional meningkatkan persepsi ancaman di Jepang dan mendorong penyesuaian kebijakan pertahanannya.

BAB III: ANCAMAN KOREA UTARA TERHADAP JEPANG

Pada bab ini penulis menyajikan data dan informasi terkait kapabilitas militer Korea Utara, serta intensifitas ancaman Korea Utara terhadap Jepang dalam rentang waktu 2015–2025, termasuk uji coba misil yang melintasi wilayah Jepang (*overflight*), peningkatan kapabilitas nuklir Pyongyang. Bab ini juga membahas ancaman yang bersifat non-konvensional, seperti kemungkinan serangan siber dan risiko penyebaran teknologi militer, yang turut memperluas spektrum tantangan keamanan di kawasan. Selain itu, bab ini juga memberikan data-data mengenai hubungan Korea Utara dengan aktor-aktor besar seperti Tiongkok dan Rusia yang turut membentuk perhitungan strategis Jepang.

BAB IV: ANALISIS STRATEGI JEPANG DALAM MERESPON ANCAMAN KOREA UTARA

Bab ini merupakan inti analisis yang membahas bagaimana strategi Jepang dalam merespon ancaman Korea Utara. Kerangka teori *Limited Hard-Balancing* diaplikasikan untuk menjelaskan bagaimana Jepang melakukan peningkatan kapasitas militer secara terbatas, dan pendalaman kerja sama keamanan formal bersama Amerika Serikat dan kemitraan strategis dengan negara-negara lain di kawasan sebagai bentuk hard balancing terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menutup pembahasan dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan serta saran terkait permasalahan penelitian.

